UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR SINGKATAN xviii
INTISARI xx
ABSTRACT xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Pertanyaan Penelitian 8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Motivasi Penelitian 8
1.6 Kontribusi Penelitian 8
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 9
1.8 Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Dasar Hukum 12
2.2 *Agency Theory* (Teori Keagenan) 13
2.3 *Good Government Governance* 14
2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah 16
2.5 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 22
2.6 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis *Website* 24
2.7 Penelitian Sebelumnya 26
BAB III METODE PENELITIAN 29

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.1 Objek Penelitian 29
3.2 Jenis Penelitian 34
3.3 Jenis dan Sumber Data 35
3.4 Analisis Data 35
3.5 Validitas Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
4.1. Analisis Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 41
4.1.1. Tahap Perencanaan APBD 42
4.1.2. Tahap Pelaksanaan APBD 51
4.1.3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD 59
4.1.4. Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Tahapan/Aspek 68
4.1.5. Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kriteria 78
4.1.6. Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 86
4.1.7. Pengkategorian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 94
4.2. Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah 99
4.2.1. Kompleksitas Pemerintah Daerah 102
4.2.2. Ukuran Legislatif 105
4.2.3. Tingkat Pembagunan Manusia 108
4.2.4. *Press Visibility* 110
4.2.5. Tingkat Kesejahteraan 113
4.2.6. Kompetisi Politik 116
4.2.7. Kemandirian Pemerintah Daerah 119
4.2.8. Kekayaan Pemerintah Daerah 122
4.2.9. Belanja Daerah 125
4.2.10. Ukuran Pemerintah Daerah 128
4.3. Validitas Data 131
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 133
5.1 Simpulan 133

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5.2 Keterbatasan Penelitian 138
5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 139
DAFTAR PUSTAKA 141

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Pemda dan *website* di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat 29
3.2 Indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 36
3.3 Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 37
3.4 Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 38
4.1 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Perencanaan pada Pulau Kalimantan Tahun 2017 43
4.2 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Perencanaan pada Pulau Sulawesi Tahun 2017 47
4.3 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Perencanaan pada Pulau Papua dan Papua Barat Tahun 2017 50
4.4 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaksanaan pada Pulau Kalimantan Tahun 2017 52
4.5 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaksanaan pada Pulau Sulawesi Tahun 2017 55
4.6 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaksanaan pada Pulau Papua dan Papua Barat Tahun 2017 58
4.7 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Pulau Kalimantan Tahun 2017 60
4.8 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Pulau Sulawesi Tahun 2017 63
4.9 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Pulau Papua dan Papua Barat Tahun 2017 67
4.10 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Kalimantan 2017 Berdasar Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah 70
4.11 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Sulawesi 2017 Berdasar Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah 72
4.12 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Papua dan Papua Barat 2017 Berdasar Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah 76
4.13 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Kalimantan Tahun 2017 Berdasarkan Kriteria Pengukuran ... 79
4.14 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Sulawesi Tahun 2017 Berdasarkan Kriteria Pengukuran 81

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.15 Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pulau Papua dan Papua Barat Tahun 2017 Berdasarkan Kriteria Pengukuran 85
4.16 Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda di Kalimantan Tahun 2017 87
4.17 Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda di Sulawesi Tahun 2017 89
4.18 Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda di Papua dan Papua Barat Tahun 2017 92
4.19 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Pulau Kalimantan Tahun 2017 95
4.20 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Pulau Sulawesi Tahun 2017 96
4.21 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Pulau Papua dan Papua Barat Tahun 2017 98
4.22 Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indeks Transparansi Tertinggi dan Terendah Pulau Kalimantan 2017 100
4.23 Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indeks Transparansi Tertinggi dan Terendah Pulau Sulawesi 2017 101
4.24 Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indeks Transparansi Tertinggi dan Terendah Pulau Papua dan Papua Barat 2017 101
4.25 Kompleksitas Pemerintah Daerah Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 102
4.26 Kompleksitas Pemerintah Daerah Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 103
4.27 Kompleksitas Pemerintah Daerah Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 104
4.28 Ukuran Legislatif Pemerintah Daerah Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 105
4.29 Ukuran Legislatif Pemerintah Daerah Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 106
4.30 Ukuran Legislatif Pemerintah Daerah Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 106

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 108
4.32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 109
4.33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 109
4.34 *Press Visibility* Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 111
4.35 *Press Visibility* Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 112
4.36 *Press Visibility* Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 112
4.37 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 113
4.38 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 114
4.39 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 115
4.40 Kompetisi Politik Pemda Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 116
4.41 Kompetisi Politik Pemda Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 117
4.42 Kompetisi Politik Pemda Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 118
4.43 Tingkat Kemandirian Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 119
4.44 Tingkat Kemandirian Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 120

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.45 Tingkat Kemandirian Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 121
4.46 Tingkat Kekayaan Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 122
4.47 Tingkat Kekayaan Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 123
4.48 Tingkat Kekayaan Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 124
4.49 Jumlah Belanja Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 125
4.50 Jumlah Belanja Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 126
4.51 Jumlah Belanja Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 127
4.52 Ukuran Pemda Pulau Kalimantan dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 128
4.53 Ukuran Pemda Pulau Sulawesi dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 129
4.54 Ukuran Pemda Pulau Papua dan Papua Barat dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah 129
4.55 *Peer Debriefer* dan Nama Pemerintah Daerah yang Direviu 132

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

I. Hasil Penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tiap Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun Anggaran 2017..... 149
II. Hasil Penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tiap Pemerintah Daerah di Sulawesi Tahun Anggaran 2017 210
III. Hasil Penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tiap Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2017 288

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
Calk	Catatan atas Laporan Keuangan
DPA PPKD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPA SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IBP	International Budget Partnership
Inpres	Instruksi Presiden
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KUA	Kebijakan Umum APBD
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
OBI	Open Budget Index
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	Peranturan Pemerintah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT
STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PPAS	prioritas dan plafon anggaran sementara
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
R-DPA	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RKA PPKD	Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUA	Rancangan Kebijakan Umum APBD
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RUP	Rencana Umum Pengadaan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPAD	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
UNDP	*United Nations Development Programme*
UU	Undang-Undang